

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami proses kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam Program Kampung Iklim pada RW 003 Cempaka Putih Timur pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori *Collaborative governance* Morse dan Stephens (2012) yang berfokus pada indikator *Assessment, initiation, deliberation, implementation*. Penelitian ini menghasilkan sejumlah penemuan penting.

Pertama, tahap *Assessment*. Tahap assessment menunjukkan kondisi yang sangat kondusif untuk pengembangan kolaborasi lingkungan. Dalam dimensi definisi masalah, ketiga stakeholder mendemonstrasikan pemahaman yang seragam tentang isu lingkungan sebagai tantangan bersama yang memerlukan penanganan kolektif, dengan pengakuan eksplisit bahwa dampak perubahan iklim dirasakan oleh semua pihak tanpa terkecuali. Penilaian kapasitas Aspek terlihat sangat realistis, dimana masing-masing stakeholder secara jujur mengakui keterbatasan kemampuan individual mereka dan kebutuhan akan dukungan eksternal. Secara keseluruhan, tahap assessment dalam kerangka collaborative governance ini telah berhasil mengidentifikasi fondasi yang solid untuk kolaborasi, dengan semua indikator kunci menunjukkan kesiapan stakeholder untuk bergerak ke tahap selanjutnya dalam proses kolaboratif. Kedua, tahap *Initiation*. Berdasarkan analisis terhadap kutipan wawancara yang telah dipaparkan, tahap *initiation* dalam kolaborasi Program Kampung Iklim (ProKlim) menunjukkan kesesuaian yang kuat

dengan kerangka teori kolaborasi Morse dan Stephens. Proses sistematis yang dilakukan melalui rapat koordinasi di awal tahun telah berhasil memfasilitasi pembentukan pemahaman bersama dan komitmen awal dari seluruh pihak yang terlibat, meliputi dinas-dinas terkait, dunia usaha, universitas, dan masyarakat. Struktur kolaborasi yang terbentuk menunjukkan pembagian peran yang jelas dan terorganisir, dimana setiap *stakeholder* memiliki kontribusi spesifik sesuai dengan kapasitas dan keahliannya masing-masing. Formalisasi hubungan kolaboratif melalui pembentukan KSBB (Kolaborasi Berskala Besar) yang dipegang oleh Subkel KDI mencerminkan upaya untuk menciptakan wadah institusional yang dapat mengoordinasikan berbagai kolaborator secara efektif. Identifikasi kebutuhan sumber daya dan komitmen konkret dari masing-masing pihak, seperti dukungan sarana prasarana dari dunia usaha dan pendampingan teknis dari universitas, menunjukkan bahwa tahap *initiation* telah berhasil menciptakan landasan yang solid untuk pelaksanaan kolaborasi. Secara keseluruhan, proses inisiasi ini selaras dengan teori Morse dan Stephens dalam tahap *initiation*. Ketiga, tahap *Deliberation*. Berdasarkan analisis implementasi tahap *deliberation* dalam kerangka teori Morse and Stephens, dapat disimpulkan bahwa proses *collaborative governance* antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sektor swasta telah menunjukkan karakteristik *deliberation* yang komprehensif dan efektif. Tahap *deliberation* dalam kasus ini tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi formal, melainkan telah berkembang menjadi mekanisme *problem-solving* yang menghasilkan *output* konkret berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang memberikan legitimasi hukum bagi kolaborasi. Keberhasilan tahap *deliberation*

tercermin dari kemampuannya menghasilkan koordinasi efektif antar-SKPD, serta mengidentifikasi dan memobilisasi sumber daya dari berbagai dinas berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi melalui musyawarah. Keempat, tahap *Implementation. Implementasi collaborative governance* dalam program ProKlim RW 003 Cempaka Putih Timur menunjukkan kompleksitas yang selaras dengan kerangka teoritis Morse dan Stephens, dimana tahap implementasi melibatkan interaksi dinamis antara *multiple stakeholders* dengan peran dan kontribusi yang saling melengkapi namun menghadapi tantangan multi-dimensional. Keberhasilan implementasi tercermin dari diversifikasi program yang komprehensif mencakup aspek lingkungan, kesehatan, dan ekonomi melalui pendekatan terintegrasi yang menggabungkan bank sampah, fasilitas cuci tangan, rak hidroponik dengan penetrasi 90%, dan sistem perikanan dengan kolam gizi. Inovasi dan adaptasi menjadi motor penggerak dalam mengatasi keterbatasan *urban setting* melalui pengembangan teknologi sederhana seperti hidroponik, *rooftop gardening*, dan kolam gizi, yang menunjukkan kapasitas adaptif yang tinggi dan pemecahan masalah kreatif yang penting dalam *urban collaborative governance*.

Secara keseluruhan, implementasi *collaborative governance* program ProKlim menunjukkan model yang matang dengan hasil berbasis bukti seperti transformasi kondisi banjir dan penurunan suhu ruangan melalui *rooftop gardening*. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, *system* menunjukkan ketangguhan melalui mekanisme kompensasi dan proses pembelajaran yang berkelanjutan, dimana *collaborative governance* yang sukses tidak berarti tidak adanya hambatan tetapi kemampuan sistem untuk mengenali, beradaptasi, dan mengatasi hambatan.

## 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi collaborative governance dalam Program Kampung Iklim RW 003 Cempaka Putih Timur, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi serupa di masa mendatang. Pemerintah perlu meningkatkan pemahaman komprehensif tentang Program Kampung Iklim di seluruh unit kerja, tidak hanya terpusat pada unit tertentu, serta membangun mekanisme mobilisasi sumber daya yang lebih efektif khususnya dalam mengoptimalkan dukungan *Corporate Social Responsibility*. Untuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, saran yang dapat diberikan adalah mengoptimalkan peran sebagai kontributor aktif bukan hanya sebagai penerima manfaat, dengan mengembangkan kapasitas lokal dalam pengelolaan mandiri berbagai fasilitas yang telah tersedia. Masyarakat juga perlu membangun sistem berbagi pengetahuan antar RT/RW untuk memperluas dampak positif program. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberlanjutan program dalam jangka panjang. Bagi sektor swasta, diperlukan peningkatan komitmen jangka panjang melalui pengembangan mekanisme komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah daerah untuk mengatasi miskomunikasi yang selama ini menjadi hambatan. Sektor swasta perlu membangun sistem monitoring internal untuk memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program kemitraan, serta mengintegrasikan program kolaborasi lingkungan ke dalam perencanaan strategis perusahaan untuk menjamin *sustainability* jangka panjang. Selain itu, orientasi pembelajaran dan transfer pengetahuan dari pihak yang lebih berpengalaman perlu dilanjutkan, disertai pengembangan program peningkatan

kapasitas untuk masyarakat dan pemerintah daerah sesuai dengan keahlian perusahaan.